BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
PROVINSI BENGKULU
SABTU, 20 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

Kejati Kebut Kasus TPP Seluma

Potensi Kerugian Negara Rp 12 M

BENGKULU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus mendalami dugaan korupsi penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Seluma tahun 2017. Dana TPP tahun tersebut yang telah dicairkan mencapai Rp 50 miliar, dimana hasil perhitungan sementara penyidik Kejati Bengkulu ada potensi kerugian negara mencapai Rp 12 miliar.

Disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidsus Henri Nainggolan, SH, MH, salah satu upaya pengumpulan alat bukti tambahan diantaranya dengan meminta keterangan dari ahli. Yakni dari Biro Hukum Kemendagri, terkait Peraturan Pemerintah (PP) soal pengucuran TPP tersebut. Ada tidak pelanggaran PP tersebut dalam pemberian TPP di Kabupaten Seluma. Bila sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang mengindikasi telah terjadi korupsi, maka penangangan kasus ini ditingkatkan ke penyidikan.

"Ada beberapa berkas dari alat bukti yang perlu segera kita lengkapi agar perkara ini bisa naik ke penyidikan. Dan untuk itu kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemendagri sebelum dalam waktu dekat ini kita mengeluarkan sprindiknya," terang Henri.

Diungkapkan Henri, dari hasil konsultasi tim dengan biro hukum Kemendagri kata Hendri, pihaknya menemukan ada aturan yang dilanggar dalam pencairan TPP di Kabupaten Seluma tahun 2017. Namun untuk lebih validnya, pihaknya masih menunggu hasil kajian dan analisa resmi dari Kemendagri atas pekara ini.

"Yang jelas ada aturan yang ditabrak oleh Pengkab Seluma dalam pencairan TPP. Karena dalam pencairan harusnya sesuai dengan peraturan Kemendagri dan Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Diketahui sebelumnya besaran TPP di lingkungan Pemda Seluma mendapat aksi protes. Hal ini terkait besaran TPP, dimana ada kesenjangan antara PNS di OPD yang ber tipe A dengan C. Pasalnya, besaran TPP pada OPD yang termasuk ke dalam TP4D, seperti jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD yang besaran TPP nya mencapai Rp 14 juta, bahkan ada yang Rp 16 juta.

Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta. Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya.

Bahkan untuk tahun 2018 ini, informasi yang dihimpun **RB**, besaran pagu anggaran untuk pembayaran TPP tahun 2018 adalah sebesar Rp 65 miliar. Hal ini tentunya akan kembali memperuncing polemik kesenjangan hak ASN atau PNS di Kabupaten Seluma. **(sly)**